ABSTRAK

MUHAMMAD LOTVI, NPM: 2022364, Judul "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Desa Banyu Tajun Pangkalan dan Sungai Pandan Hulu)" Dibawah bimbingan Bapak **SELAMAT RIADI, S.Sos., M.AP.** sebagai pembimbing I dan Bapak **GUSTI MUHAMMAD HIDAYATULLAH, S.Sos., M.AP.** sebagai pembimbing II.

Penelitian ini dilatarbelakangi peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah telah ditetapkan sebagai landasan hukum pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, namun di Desa Banyu Tajun Pangkalan dan Desa Sungai Pandan Hulu masih ditemukan berbagai permasalahan seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan, kurangnya sarana pemilahan sampah, serta tidak rutinnya pengangkutan sampah yang menyebabkan penumpukan dan pencemaran lingkungan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penentuan secara purposive sampling berjumlah 9 Orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data pada penelitian ini perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus, menggunakan bahan referensi dan melakukan membercheck.

Hasil dari penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara secara keseluruhan berjalan cukup baik. Hal ini terlihat pada : pertama, sub variabel komunikasi indikator informasi sudah cukup baik, indikator koordinasi sudah baik. Kedua, sub variabel sumber daya indikator fasilitas sarana masih terbatas, indikator kinerja terbilang cukup baik. Ketiga, sub variabel disposisi indikator motivasi cukup baik pada desa banyu tajun pangkalan namun pada desa sungai pandan hulu masih perlu ditingkatkan, indikator partisipasi sudah cukup baik. Keempat, sub variabel struktur birokrasi indikator standar operasional prosedur (SOP) di lapangan belum sepenuhnya terjalin dengan baik, indikator pengontrolan terbilang cukup baik. Adapun faktor pendukung adalah adanya dukungan kebijakan dasar dan koordinasi antar pihak yang terkait, sedangkan faktor penghambat meliputi kurangnya sosialisasi, keterbatasan fasilitas tempat sampah terpilah (organik, anorganik, dan residu), serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah.

Untuk meningkatkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Banyu Tajun Pangkalan dan Sungai Pandan Hulu) disarankan kepala desa untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat, menambah alokasi anggaran untuk menyediakan fasilitas tempat sampah terpilah, membuat sop tertulis, serta mengundang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DISPERKIM LH) untuk memberikan pelatihan atau pembinaan kepada masyarakat dan petugas kebersihan. Sementara itu, petugas kebersihan dan masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam program pengelolaan sampah yang diorganisir oleh pemerintah desa dan pihak terkait agar dapat lebih memahami peraturan tersebut dan turut serta melakukan pemilahan sampah.

ABSTRAK

MUHAMMAD LOTVI, Student ID: 2022364, Thesis Title: "IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 16 OF 2013 CONCERNING WASTE MANAGEMENT IN SUNGAI PANDAN DISTRICT, HULU SUNGAI UTARA REGENCY (Case Study of Banyu Tajun Pangkalan Village and Sungai Pandan Hulu Village)" Supervised by **SELAMAT RIADI, S.Sos., M.AP.** as First Supervisor and **GUSTI MUHAMMAD HIDAYATULLAH, S.Sos., M.AP.** as Second Supervisor.

This research is grounded in Regional Regulation Number 16 of 2013 on Waste Management has been established as the legal basis for waste management in Hulu Sungai Utara Regency. However, various issues persist in Banyu Tajun Pangkalan Village and Sungai Pandan Hulu Village, including limited public understanding of the regulation, lack of facilities for sorted waste disposal, and irregular waste collection that leads to accumulation and environmental pollution. This study aims to examine the implementation of Regional Regulation Number 16 of 2013 on Waste Management in Sungai Pandan District, Hulu Sungai Utara Regency, as well as to identify factors influencing its implementation.

This research employs a qualitative approach with a descriptive qualitative type. Data collection techniques used include observation, interviews, and documentation. Data sources were selected through purposive sampling, involving a total of 9 informants. The collected data were then analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing or verification. To ensure data credibility, the study extended observation duration, improved thoroughness, conducted triangulation, performed case analysis, used reference materials, and carried out member checking.

Overall, the implementation of Regional Regulation Number 16 of 2013 concerning Waste Management in Sungai Pandan District, Hulu Sungai Utara Regency, has proceeded quite well. This is evident from the following: first, regarding the communication sub-variable, the information indicator is satisfactory, and the coordination indicator is good. Second, regarding the resources sub-variable, the facilities indicator shows limited resources, while the performance indicator is considered quite good. Third, regarding the disposition sub-variable, the motivation indicator is satisfactory in Banyu Tajun Pangkalan Village but requires improvement in Sungai Pandan Hulu Village, while the participation indicator is satisfactory. Fourth, regarding the bureaucratic structure sub-variable, the implementation of Standard Operating Procedures (SOPs) in the field is not yet fully effective, although the control indicator is considered quite good. Supporting factors include foundational policy support and coordination among relevant parties, whereas inhibiting factors include insufficient public outreach, a shortage of segregated waste disposal facilities (for organic, inorganic, and residual waste), and a lack of public awareness regarding proper waste disposal.

To improve the implementation of Regional Regulation Number 16 of 2013 concerning Waste Management in Sungai Pandan District, Hulu Sungai Utara Regency (a case study of Banyu Tajun Pangkalan and Sungai Pandan Hulu villages), it is recommended that village heads conduct comprehensive public outreach, increase budget allocations to provide segregated waste disposal facilities, establish written Standard Operating Procedures (SOPs), and invite the Department of Public Housing, Settlement Areas, and Environment (DISPERKIM LH) to provide training or guidance to the community and sanitation workers. Meanwhile, sanitation workers and residents are expected to actively participate in waste management programs organized by the village government and relevant stakeholders to better understand the regulation and engage in waste segregation.